

Jurnal

by __

Submission date: 08-Mar-2023 11:12AM (UTC+0300)

Submission ID: 2021178970

File name: Jurnal.docx (54.21K)

Word count: 2353

Character count: 16032

DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

Oleh

Imam Sucahyo¹, Husni Mubaroq², Muh. Sunil Rizaldi³

Universitas Panca Marga Probolinggo, Jawa Timur-IndonesiaE-mail:

³icalrizaldi64@gmail.com

Article History:

Received: 04-11-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 24-12-2022

Keywords: Dampak
Peraturan Pemerintah,
Sosial Ekonomi,
Pedagang, Pasar Maron
Kabupaten Probolinggo

Abstract: Pandemi covid-19 merupakan puncak perubahan terjadinya tatanan kehidupan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk terus melakukan perubahan dalam setiap kegiatan. Banyak masyarakat terdampak dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai pandemi covid-19 salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang memiliki dampak cukup besar terhadap masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini mencoba menganalisis peraturan tersebut dari sudut pandang dampak negatif dan positif terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pedagang pasar. penelitian ini lebih fokus pada jawaban pedagang mengenai dampak penerapan PSBB terhadap sosial ekonomi pedagang di pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang yang kebanyakan berfikir positif terhadap penerapan PSBB. Walaupun tidak semua pedagang menerapkan PSBB sesuai yang diputuskan oleh pemerintah. Penerapan tersebut sangat bermanfaat karena mengurangi penularan penyakit covid-19 yang ada dimasyarakat.

PENDAHULUAN

Perubahan tatanan peradaban kehidupan sosial masyarakat terjadi dipicu adanya pandemi virus corona. Perubahan terjadi pada model tata laku masyarakat saat melakukan kegiatan yang sebelumnya masih jarang dilakukan berubah menjadi kebiasaan baru. Selain itu, masa pandemi memberikan dampak perubahan sosial yang tergolong tidak ada perencanaan dan tidak dikehendaki oleh masyarakat sosial. Perubahan tersebut memberikan pengaruh pada disorganisasi disetiap aspek tatanan hidup masyarakat. Pertumbuhan perekonomian global, termasuk Negara Indonesia tahun 2020 tergolong pada potensi dan prospek semakin menurun. Sekaligus adanya tekanan pasar keuangan di dunia berlanjut yang disebabkan ketidakpastian yang besar. Khususnya saat penyebaran virus corona masih mewabahi masyarakat. Maka setiap negara dengan tegas merumuskan kebijakan terkait penerapan regulasi dan arahan model jaga jarak, dan (Michael, 2020).

Penyebaran virus corona juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Penyebaran virus corona menciptakan dampak pada tatanan kehidupan di masyarakat. Dampak tersebut meliputi aspek ekonomi, politik, dan sosial. Seperti pada Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada aspek sosial ditunjukkan perubahan sosial terkait bentuk interaksi dan sosialisasi masyarakat saat menjalankan kebijakan dan arahan *social/physical distancing*. Bahkan pada aspek ekonomi terjadi penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya pendapatan atau pemasukan masyarakat, serta terjadi pemutusan hubungan kerja. Artinya dampak yang terjadi pada aspek sosial juga berkaitan dengan adanya perubahan pada aspek ekonomi. Sehingga fenomena ini menjadi pemicu bagi peneliti untuk melakukan riset mendalam dan lebih detail. Masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menurunnya pemasukan pada pelaku usaha atau UKM memberikan dampak pada aspek sosial serta dampak pada aspek lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai "Dampak peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo".

LANDASAN TEORI

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Menurut Soetopo kebijakan publik merupakan bentuk kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kepentingan negara atau pemerintah guna orientasi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan tujuan, nilai, dan praktek. Kebijakan tersebut memuat keuntungan bagi masyarakat dan tidak menciptakan kerugian (Soetopo, 2005:10).

b. Dampak

Dampak merupakan bentuk akibat yang diciptakan dari penerapan suatu kebijakan maupun program. Kebijakan maupun program tersusun dari formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan maupun program, serta evaluasi. Setiap perumusan kebijakan oleh pemerintah akan memerlukan dampak. Dampak artinya ada pengaruh yang tercipta pada penerapan kebijakan maupun program pada masyarakat. Definisi dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwa memiliki arti benturan, pengaruh yang menciptakan akibat positif maupun akibat negatif. (KBBI Online, 2010)

c. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Menurut Alwi, Hasan (2007) memaparkan bahwa Kondisi sosial dalam masyarakat memiliki arti sebagai pengembangan masyarakat. Kondisi sosial menjadi keadaan yang berhubungan pada situasi keadaan sosial masyarakat. Menurut Linton (2003) dan Basrowi dan Juariyah (2010) kondisi sosial masyarakat sesuai padalima indikator meliputi usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keluarga, *prestise*, dan sebagai bagian dari kelompok. Akan tetapi indikator usia dan jenis kelamin memberikan pengaruh pada pendidikan. Indikator lainnya dapat diukur dengan tujuan mendapatkan data terkait manfaat sosial bagi masyarakat.

2. Kondisi Ekonomi

Menurut Robinson (2009) memaparkan bahwa kondisi ekonomi merupakan bentuk keadaan rasional dan penempatan posisi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pendapatan individu dalam pemenuhan kebutuhan. Keadaan ekonomi individu dipengaruhi oleh jenis pekerjaan. Individu yang memiliki pekerjaan secara otomatis menghasilkan pendapatan yang digunakan pemenuhan kebutuhan meliputi kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

8
3. Kondisi sosial ekonomi

Menurut Sastro Pratja (2002) dalam Basrowi dan Juariyah (2010) memaparkan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan bentuk keadaan atau posisi individu pada lingkungan masyarakat. Kondisi ekonomi sosial masyarakat yang bervariasi dan kompleks, khususnya pada kualitas lingkungan permukiman dan aspek kesehatan. Pada dinamika ekonomi berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan melalui usaha peningkatan kualitas kehidupan. Jika pada masyarakat yang tergolong yang memiliki pendapatan rendah sehingga pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Bahkan tempat tinggal cenderung kumuh. Pemukiman kumuh akan berdampak pada kesehatan yang memburuk. Hal ini yang tergolong merupakan lingkaran kemiskinan yang sukar teratasi, terlebih adanya pertumbuhan pendudukan.

4. Pasar

Pasar merupakan bentuk transaksi antara penjual dan pembeli. Pada teori ekonomi mikro pasar menjadi lokasi antara pembeli dan penjual guna melakukan transaksi. Menurut Hendri Ma`ruf memaparkan bahwa pasar memuat tiga arti, meliputi pasar merupakan tempat artinya wadah pertemuan penjual yang menjual dengan pembeli sebagai konsumen; Pasar memuat konsep interaksi artinya ada bentuk permintaan dan penawaran sebagai interaksi jual dan beli; dan Pasar mengandung proses tawar menawar harga. Kasmir memaparkan bahwa pasar tradisional merupakan wadah pertemuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Maka secara universal, Pasar merupakan wadah adanya metode yang terjadi antara pembeli dan penjual yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran.

Pasar tradisional terdapat di kota dan desa. Karakteristiknya terdapat proses jual-beli yang berhubungan personal, sumber informasi, dan sarana pendukung perekonomian di kota dan di desa. Bangunan pasar tradisional berbentuk kios, gerai dan dasaran terbuka.

METODE PENELITIAN

7 Metode yang diterapkan terkait analisa data yang telah dihimpun adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan kepada pedagang pasar yang dianggap dapat menjawab pertanyaan sesuai relevansi penelitian dan bisa memberikan gambaran yang berfokus pada jawaban pedagang mengenai dampak penerapan PSBB terkait sosial ekonomi pada penjual atau pedagang di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Sumber data dalam riset adalah bersumber dari data primer. Data primer yang diterapkan pada riset ini berisikan data dan informasi terkait dampak Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 terhadap sosial ekonomi pedagang di pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Data yang berikutnya merupakan data sekunder sebagai pendukung seperti hasil riset terdahulu, laporan, buku, artikel ilmiah, dan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas yang dapat ditangkap dari peneliti bahwasanya banyak hal yang disampaikan dari informan terkait dampak secara ekonomi yang membuat pedagang semakin mengeluh terhadap adanya peraturan PSBB. Ekonomi yang sebelumnya stabil sebelum adanya penerapan peraturan ini dan kemudian berubah drastic ketika diterapkan peraturan PSBB, sehingga masyarakat sekitar maron sulit beradaptasi dengan keadaan yang serba diatur atau dibatasi. Bukan hanya dari sector ekonomi saja yang membuat masyarakat sekitar maron merasa tidak nyaman dengan adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tetapi aspek social pun terdampak, dimana

masyarakat maron yang sebelumnya terlihat harmonis antara satu dengan yang lainnya kini mereka seakan enggan untuk berinteraksi dan hal ini bukan karena hubungan emosional mereka renggang tetapi karena adanya peraturan yang ditegakkan untuk menyukseskan program pemerintah, maka mau tidak mau masyarakat harus menjaga kontak fisik dan mengurangi berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal ini kebijakan yang pemerintah ambil dalam bentuk sebuah peraturan, pada dasarnya bertujuan baik untuk meminimalisir penyebaran covid-9 yang akan berakibat kematian terhadap masyarakat di sekitar desa maron.

Dalam hal ini terdapat variable, sub variable dan beberapa indicator yang digunakan untuk melakukan penelitian diantaranya adalah dalam aspek dampak negatif dan positif yang memiliki indikator pandangan dan pendapatan pedagang pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Setelah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pendapatan pedagang pasar Maron Kabupaten Probolinggo menurun drastis. Adanya peraturan tersebut memberikan pengaruh pada bentuk permintaan produk barang ataupun jasa terutama pada pasar tradisional. Pedagang pada pasar tradisional memiliki pemasukan yang relatif besar. Akan tetapi sejak dirumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan pengaruh pemasukan dan tingkat penjualan relatif menurun. Adapun penjelasan dari setiap indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Dampak positif merupakan keinginan guna memberikan bimbingan, memberikan keyakinan, memberikan pengaruh pada orang lain, dengan maksud guna pemenuhan kebutuhan. Positif merupakan situasi jiwa yang mengorientasikan pada aktivitas kreatifitas, gembira, dan optimis. Kondisi jiwa setiap individu melalui upaya agar tidak beralih fokus pada mental negatif. Dampak positif merupakan upaya dalam memberikan bimbingan, keyakinan, pengaruh, dan kesan pada orang lain dengan tujuan guna pendukung keinginan yang baik. Dampak positif memuat indikator yang memberikan dampak pada sosial ekonomi penjual yang berdagang saat penerapan PSBB, meliputi :

1. Pandangan

Pandangan masyarakat khususnya pedagang di pasar maron terhadap penerapan PSBB. Selama pandemi pandangan masyarakat merasakan sesuai atau tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat khususnya pedagang terhadap positifnya penerapan PSBB itu sendiri. Bahwa penerapan PSBB sesuai dalam pandangan pedagang khususnya pedagang kecil, dikarenakan ada dampak positif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan pandangan pedagang sesuai dengan harapannya.

2. Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari pedagang yang bekerja guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Selama pandemi pendapatan yang didapatkan pada yang relevan dan ada yang tidak relevan pada harapan. Hal itu terjadi karena penerapan PSBB yang mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat yang datang untuk sekedar melihat atau membeli dagangan mereka. bahwa penerapan PSBB sesuai dalam pendapatan pedagang khususnya pedagang koveksi, dikarenakan ada dampak positif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan walau pendapatan pedagang masih sama saja seperti sebelum adanya penerapan PSBB.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan bentuk pengaruh besar dalam bentuk akibat buruk atau negatif. Dampak negatif merupakan memberikan pengaruh buruk yang lebih dominan daripada dampak positif. Artinya, dampak negatif merupakan keinginan guna memberikan bujukan, keyakinan, pengaruh, dan kesan pada orang lain, yang bertujuan guna mereka pemenuhan kebutuhan yang menciptakan akibat tertentu.

1. Pandangan

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan PSBB tidak sesuai dalam pandangan pedagang khususnya pedagang kecil, dikarenakan ada dampak Negatif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan pandanganpedagang tidak sesuai dengan harapannya.

2. Pendapatan

Penerapan PSBB tidak sesuai dalam pendapatan pedagang khususnya pedagang Aksesoris, dikarenakan ada dampak Negatif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan pendapatan pedagang tidak sesuai dengan harapannya. Kebijakan PSBB pada masa pandemi berakibat akan perubahan sosial pada perubahan interaksi sosial pedagang yang berkaitan dengan kegiatan dalam perdagangan. Perubahan ini menciptakan gangguan proses interaksi pada masyarakat terutama interaksi penjual dan pembeli. Komunikasi yang terbatas pada interaksi jual beli yang dipicu adanya regulasi dengan konsep pembatasan jarak pada interaksi sosial.

Pada bidang ekonomi, Kebijakan PSBB pada masa pandemi menciptakan perubahan yang dialami oleh penjual yang berdagang atau menjual produknya. Terdapat perubahan dalam interaksi antara penjual saat melayani pembeli. Termasuk dalam peningkatan daya saing dalam perdagangan.

KESIMPULAN

Dari hasil observasi yang dilakukan, pendapatan yang diperoleh tidak sesuai harapan masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya daya beli, adanya penerapan PSBB dimasyarakat dan pada saat itu pembeli juga dalam masa sulit. Pendapatan yang diperoleh pun tidak sama seperti sebelumnya sebelum pandemi berlangsung. Melalui observasi kita dapat melihat sebagian masyarakat merasa pendapatan berkurang sebelum penerapan. Hal itu membuat pedagang berfikir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun penghasilan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu sebagian masyarakat mengeluh karena tidak dapat bekerja seperti sebelum penerapan karena bingung dari penerapan mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai yang diharapkan selama ini. Selama penerapan PSBB pendapatan masyarakat banyak yang berfikir negatif terhadap kurangnya penerapan dari petugas pasar. Hanya sebagian yang menerapkan dikarenakan banyaknya pembeli yang menyesuaikan jam kerja di pasar. Sehingga menyulitkan pedagang untuk menerapkan PSBB yang dapat informasi dari petugas pasar.

Adapun beberapa saran yang direkomendasikan peneliti diantaranya adalah Bagi pemerintah, harus lebih banyak memberikan penjelasan tentang arti penerapan PSBB dan memberikan solusi agar masyarakat bisa membeli dagangan pedagang agar pedagang bisa menjual dagangannya dengan sesuai harapannya. Bagi pedagang dan masyarakat, harus bisa menerapkan PSBB dengan baik agar pelaksanaan jual beli dipasar berjalan lancar dan sesuaiharapan yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

1. Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 20012
2. A., Morissan M. dkk.2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
3. Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
4. ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR KLATEN DAN WONOGIRI | AZIMAH | EMPATI: *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. (n.d.). Retrieved July 23, 2022, from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/16485>
5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATAHAN WAKTU OPERASIONAL PASAR DI KABUPATEN MINAHASA AKIBAT PENANGGULANGAN COVID-19 | Sidik | *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. (n.d.). Retrieved July 23, 2022, from <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1160/1085>
6. AZIMAH, R. N., KHASANAH, I. N., PRATAMA, R., AZIZAH, Z., FEBRIANTORO, W., & PURNOMO, S. R. S. (2020). ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR KLATEN DAN WONOGIRI. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 59-68. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.16485>
7. Herison, H. (2020). DAMPAK EKONOMI PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 11(2), 164-173. <https://doi.org/10.36975/jeb.v11i2.269>
8. Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
9. Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639- 648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
10. Pratama, S., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 59-78. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i4.32034>
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Jurnal

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repo.unand.ac.id

Internet Source

1%

2

www.researchgate.net

Internet Source

1%

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

5

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

1%

6

artanengsisianipar.wordpress.com

Internet Source

1%

7

www.neliti.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

<1%

9

Submitted to Universitas Jenderal Achmad
Yani

Student Paper

<1%

10 fisip.prosiding.unri.ac.id <1 %
Internet Source

11 adoc.pub <1 %
Internet Source

12 docplayer.info <1 %
Internet Source

13 publikasi.unitri.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Jurnal

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
